



PEMERINTAH KOTA JAMBI

LAPORAN TAHUNAN

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI**

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Limpahan Berkat dan Rahmatnya sehingga laporan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi ini dapat tersusun.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan ini masih banyak kekurangan baik kelengkapan maupun akurasi serta ketepatan waktu maupun penyajiannya. Untuk itu guna kesempurnaan penyusunan Permintaan Laporan Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2025 ini di masa datang kami harapkan kritik dan saran dari pembaca.

Demikian atas bantuan berbagai pihak yang terkait dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2026

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAMBI**

M. WILDAN MURTADHO AL-IDRUS, S.P., M.H
Pemula
NIP. 1980509 200901 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1. Latar Belakang.....1

 1.2. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah10

 1.3. Tantangan dan Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah11

BAB II PAGU BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....12

 2.1 Pagu Belanja Perangkat Daerah Berdasarkan Komponen Belanja Beserta
 Realisasi12

 2.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....13

 2.3 Capaian Kinerja Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD serta Tindaklanjut
 Rekomendasi DPRD16

 2.4 Akuntabilitas Kinerja31

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN34

 3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantu.....34

BAB IV INOVASI, PRESTASI DAN PENGHARGAAN35

BAB V PENUTUP36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pagu Belanja Perangkat Daerah berdasarkan Komponen Belanja beserta realisasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	12
Tabel 2.2.	Keterkaitan Urusan Perangkat Daerah terhadap RPJMD 2025-2029.....	16
Tabel 2.3.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah	17
Tabel 2.4.	Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator, target dan realisasi anggaran tahun 2025	20
Tabel 2.5.	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	30
Tabel 2.6.	Capaian Perjanjian Kinerja.....	31
Tabel 2.7.	Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023-2025	32
Tabel 2.8.	Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2025	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 154 ayat 1 butir h menyatakan bahwa meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Adapun sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tersebut menggunakan dasar Laporan Tahunan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Penyusunan laporan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tahun anggaran 2025, merupakan suatu kewajiban dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Laporan tahunan 2025 ini merupakan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang optimal melalui informasi yang berkualitas guna mendukung terciptanya pemerintahan yang baik.

1.1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dari sisi perencanaan, dengan terbitnya Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah merubah pola perencanaan yang ada, dari shopping list ke working plant. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses Bottom –Up dan Top Down.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14); dan Peraturan Walikota Jambi Nomor : 50 Tahun 2025 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- b. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- c. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.

- e. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota bersama dengan Menteri Teknis.

Sekretariat mempunyai Fungsi membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. Pelaksanaan pembinaan ketatausahaan umum, kepegawaian, aset dan keuangan;
- c. Penyelenggaraan pengawasan, monitoring pelaksanaan pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan serta kepegawaian dan aset;
- d. Penghimpunan dan pengkoordinasian pelaksanaan program kerja bidang guna penyusunan laporan bulanan dan tahunan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan kantor serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
- e. Pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas;
- f. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- g. pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
- i. pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
- j. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
- k. pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- l. penyelenggaraan publikasi;
- m. pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- n. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
- o. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar Lembaga; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Subbagian Ketatausahaan mempunyai tugas:

- a. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
- b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan ketatausahaan dan ke rumahtanggaan kepala dinas;
- d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;
- f. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara dinas;
- g. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan dinas; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan perumahan, PSU perumahan dan pengembangan perumahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kota sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
 - a. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
 - b. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan; dan
 - d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang kawasan permukiman mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pembinaan dan peningkatan kawasan permukiman, pemanfaatan kawasan permukiman dan pengendalian kawasan permukiman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
 - b. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
 - d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; serta Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang psu perumahan dan kawasan permukiman serta pemantauan dan evaluasi di bidang psu perumahan dan kawasan permukiman tingkat kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.1.2. Sumber Daya Manusia dan Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per Tahun 2025 adalah sebanyak 84 orang yang terdiri dari PNS 28 orang, Pekerja Harian Lepas 11

orang, Pegawai PPPK Sebanyak 44 orang dan Outsourcing 1 orang.

Tabel I
Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menurut status kepegawaian dan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Pegawai Negeri Sipil	18	10	28
2	Calon pegawai Negeri Sipil	-	-	-
3	Pekerja Harian Lepas	11	-	11
4	P3K	29	15	44
5	Outsourcing	-	1	1
	Jumlah	58	26	84

Sumber : Dinas DPRKP kota Jambi

Tabel II
Jumlah PNS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	SD	SLTP	SLTA	D. I	D. II	D. III SARJANA MUDA/ AKADEMI	D. IV	S. 1	S. 2	S. 3	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PENDIDIKAN	-	2	34	-	-	1	-	39	3	-	84

Sumber : Dinas DPRKP kota Jambi

Table III
Jumlah PNS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menurut Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

NO	GOLONGAN RUANG	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	2	3	4	5
JUMLAH TOTAL		18	10	28
2	I/a	-	-	-
3	I/b	-	-	-
4	I/c	-	-	-
5	I/d	-	-	-
JUMLAH		-	-	-

6	II/a	1	-	1
7	II/b	-	-	-
8	II/c	1	-	1
9	II/d	3	1	4
JUMLAH		5	1	6
10	III/a	2	-	2
11	III/b	-	1	1
12	III/c	2	-	2
13	III/d	6	6	12
JUMLAH		10	7	17
14	IV/a	3	1	4
15	IV/b	1	-	1
16	IV/c	-	-	-
17	IV/d	-	-	-
18	IV/e	-	-	-
JUMLAH		4	1	5
19	IX	12	9	21
20	V	9	2	11
JUMLAH		21	11	32

Sumber : Dinas DPRKP kota Jambi

Tabel IV
Gambaran Struktur dan Sumberdaya Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanTahun 2025.

NO	JABATAN	ESELLON	KEBUTUHAN (Orang)	Terisi		KURANG	Ketentuan
				JML	GOL		Pangkat/Gol
1	Kepala Dinas	II/b	1	1	IV/b	-	IV/b
2	Sekretaris	III/a	1	1	IV/b	-	IV/a
3	Ka. Bidang Bidang Perumahan Bidang Permukiman a. Bidang PSU b. c.	III/b	3	3	III/d III/d IV/a	-	III/d
4	Kasubbag a. Subbag Perencanaan dan Keuangan b. Subbag Umum dan Kepegawaian	IV/a	2	1 1	IV/a III/d	-	III/b
5	Fungsional a. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli	IV/a	3	1	IV/a III/d	2	III/c

b.	Muda						
	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda		6	1 3	IV/a III/d	2	
	Jumlah		16	12		4	

Sumber : Dinas DPRKP kota Jambi

1.1.3. Aset Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi didukung sarana/Prasarana atau aset yang relative cukup baik berupa aset tetap maupun aset bergerak.

Aset berupa kantor yang relatif cukup baik dengan luasan yang cukup,terdiri dari ruang Kepala,ruang sekretaris dan staf sekretaris, ruang bidang bidang dan staf bidang,selain itu juga dilengkapi dengan satu ruang rapat kapasitas 20 orang.Halaman yang cukup luas dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang parkir.

a. Kendaraan Operasional

Mengingat beban tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yang cukup berat terutama pada masa yang akan dating dalam Tata Ruang dan Perumahan, bidang pengendalian perkembangan pembangunan fisik kota secara keseluruhan sudah barang tentu fasilitas kendaraan operasional yang ada saat ini tentunya masih jauh dari pada mencukupi baik dari kondisi kendaraan maupun dari jumlah kendaraan. Berikut kebutuhan dan kendaraan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 pada Tabel V.

Tabel V.

Keadaan dan Jumlah Kendaraan Operasonal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

NO	URAIAN	JML YG ADA	KEBUTUHAN	KEKURANGAN
	Mobil Kepala Dinas	1 unit	1 unit	-
	Mobil Operasional	1 unit	2 unit	1 unit
	Sekretariat			
	Roda 4	2 unit	2 unit	
	Roda 2	6 unit	6 unit	
	Bidang Perumahan			
	Roda 4	1 unit	2 unit	1 unit

	Roda 2	3 unit	4 unit	1 unit
	Bidang PSU			
	Roda 4	3 unit	3 unit	
	Roda 2	6 unit	6 unit	
	Bidang Kawasan Pemukiman			
	Roda 4	1 unit	1 unit	
	Roda 2	4 unit	4 unit	
	JUMLAH			
	Roda 4	10 unit	11 unit	2 unit
	Roda 2	20 unit	20 unit	1 unit

b. Gedung Kantor

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKota Jambi, saat ini menempati kantor Eks. Gedung Pembantu Wilayah Timur Provinsi Jambi yang beralamat di Jl. H. Zainir Havis, BA No. 60 dengan luas lahan 4.265 M²dan luas bangunan 448 M². Aset berupa kantor yang relatif cukup baik dengan luasan yang cukup, terdiri dari ruang kepala, ruang sekretaris dan staf sekretariat, ruang bidang-bidang dan staf bidang, selain itu juga dilengkapi dengan satu ruang rapat kapasitas 20 orang. Halaman yang cukup luas dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang parkir. Hal ini dapat dilihat pada Tabel VI.

Tabel VI.
Gambaran dan Kapasitas Ruang Kantor 2025

NO	URAIAN	LUAS RUANGAN	STANDAR	KEBUTUHAN
1	R. Kadis	48 M ²	48 M ²	48
2	R. Sekretariat	96 M ²	96 M ²	96
3	R. Ka. Bidang PSU	12 M ²	12 M ²	12
4	R. Loker	21 M ²	21 M ²	21
5	R. Bidang PSU	48 M ²	120 M ²	72
6	R. Bidang Perumahan	32 M ²	72 M ²	40
7	R. Dharma Wanita	48 M ²	84 M ²	36
8	R. WC	54 M ²	108 M ²	64

9	R. Arsip	48 M²	156 M²	108
10	R. Penerima Tamu	21 M²	21 M²	-
11	R. Rapat	28 M²	96 M²	68
12	R. Urusan Pemakaman	120 M²	120 M²	0
13	Gudang	18 M²	24 M²	6
14	Mushollah	36 M²	36 M²	0
15	Garasi	150 M²	150 M²	0
16	R. Market	90 M²	90 M²	0

c. Perlengkapan Kantor

Perlengkapan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Jika ditinjau dari fungsi dan peranannya sebagai lembaga dinas teknis yang melayani kebutuhan masyarakat dalam pembangunan fisik kota, yang bersifat kegiatan usaha masih kurang memadai. Disamping hal tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi belum dilengkapi dengan perlengkapan operasional yang bersifat elektronika maupun program dan pengendalian pelayanan Perumahan dan administrasi terutama dalam menghadapi kebutuhan mendatang dan eraglobalisasi, hal ini dapat dilihat pada table VII.

Tabel VII.
Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025

NO	URAIAN	JML YANG ADA	KONDISI	STANDAR KEBUTUHAN	KURANGAN
1	Peralatan Bongkar Reklame/ Mesin Las	1	Baik	1	-
2	AC	11	Baik	11	-
3	Kamera Pengawas (CCTV) Dan Perlengkapanya	6	Baik	6	-
4	Filling cabinet	16	3 rusak	16	-
5	Tangga Lipat	5	Baik	5	-
6	Almari Es	1	Baik	1	-
7	Kamera Digital	5	Baik	5	-
8	Komputer	6	Baik	6	-
9	Note book/ Laptop	25	3 rusak ringan	25	-

10	Scanner	2	Baik	2	-
11	Router	5	1 rusak	5	-
12	Faximile	1	Baik	1	-
13	Sound System	5	Baik	5	-
14	Kursi	128	Baik	128	-
15	Meja	8	Baik	8	-
16	Proyektor	1	Baik	1	-
17	Printer	10	Baik	10	-
18	Televisi	1	Baik	1	-
19	Meubelair	1	Baik	1	-
20	Almari Arsip	14	Baik	14	-
21	Almari Keuangan	1	Baik	1	-
22	Lori	1	Baik	1	-
23	Bending Machine	1	Baik	1	-

Sumber : Dinas DPRKP kota Jambi

1.2. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

a. Target dan Realisasi 2023-2025

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023-2025

No	Jenis PAD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	Retribusi Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat	10,000,000.00	16,500,000.00	54,400,000.00	14,550,000.00	00.00	00.00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	433,000,000.00	91,195,000.00	433,000,000.00	101,845,000.00	250,000,000.00	117,280,000.00
3	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	2,000,000.00	2,001,500.00	2,000,000.00	1,519,900.00	2,000,000.00	450,000.00
4	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	16,000,000,000.00	8,450,307,424	00.00	00.00	00.00	00.00
Total		16,445,000,000.00	8,560,003,923.91	489,400,000.00	117,554,900.00	252,000,000.00	117,730,000.00

b. Tantangan dan Permasalahan Serta Upaya yang Sudah Dilakukan untuk Mengatasi Tantangan dan Permasalahan serta tingkat keberhasilan yang dicapai.

Tabel 1.2
Tantangan, Permasalahan dan Upaya Mengatasi Tantangan dan Permasalahan Tahun 2025

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Upaya yang dilakukan
1	Permasalahan Bidang Permukiman	Kondisi fisik permukiman cenderung menurun	Terlihat kecenderungan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan	Melakukan penataan ulang tata letak bangunan agar lebih teratur, Perbaikan drainase, sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah, Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
		kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan permukiman kumuh merupakan masyarakat berpenghasilan rendah/MBR	Masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu/berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah yang layak huni untuk dihuni dimana rumah layak huni atah RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni.	Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), penyediaan rumah subsidi, pembangunan rumah susun sederhana, KPR bersubsidi
2	Permasalahan Bidang PSU	Masih ada lampu yang berjenis Sodium	Tidak efisien dan mengakibatkan pemborosan jika dicabut tidak tempat penyimpanan.	Secara bertahap menggantikannya dengan lampu LED yang efisien pengerjaan, waktu, tidak terpaku pada penyimpanan yang banyak memakan tempat karena setiap kerusakan nya langsung di perbaiki ulang oleh perusahaan lampu tersebut.
		Banyaknya pencurian jaringan kabel PJU	Ketidakamanan Lingkungan : Derah yang tidak aman atau tidak terawat dapat memicu pencurian kabel, Orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sulit untuk memperoleh pekerjaan dapat tergoda untuk mencuri kabel karenan dianggap sebagai sumber penghasilan yang cepat.	Mengganti kabel tembaga dengan kabel berbahan aluminium atau material yang kurang memiliki nilai jual tinggi, Menggunakan kabel tanam (underground cable) agar tidak mudah diakses, Penggunaan penutup box panel yang terkunci dan berstandar keamanan tinggi
		Keterbatasan jumlah tiang lampu	Sementara ini untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum manumpang di tiang milik PT.PLN.	Penambahan PJU secara bertahap, optimalisasi penempatan tiang lampu.
3	Permasalahan Bidang Perumahan	Banyak Lampu yang di tabrak	Sulit melacak pelaku penabrakan tiang PJU yang kabur.	Peningkatan rambu dan marka jalan, penegakan aturan lalu lintas
		Masih banyak RTH dan sarana umum yang belum terkelola dan tertata dengan baik	kurangnya tenaga teknis serta minimnya PSU menyebabkan hasil kurang optimal	Perencanaan dan penataan ulang, peningkatan pemeliharaan rutin
		Masih banyak perumahan yang belum serah terima PSU	Kesadaran pengembang untuk serah terima PSU masih rendah	Penegakan regulasi, pendataan dan inventarisasi
		Belum optimal pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengembangan	Masih kurang jumlah SDM teknis dibidang perumahan dalam kegiatan pengawasan.	
		Masih banyak sarana dan utilitas perumahan yang belum terkelola dan tertata	Masih kurangnya tenaga teknis untuk pengelolaan PSU.	

1.3. Tantangan dan Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan perangkat daerah pada rusunawa, pemakaman, dan mobil jenazah masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Permasalahan utama meliputi keterbatasan anggaran dan lahan, belum optimalnya tata kelola dan pendataan, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan SDM. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, layak, dan merata belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan dan regulasi, peningkatan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan, optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah, serta pemanfaatan digitalisasi layanan agar penyediaan rusunawa, pengelolaan pemakaman, dan pelayanan mobil jenazah dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan manusiawi.

BAB II
PAGU BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

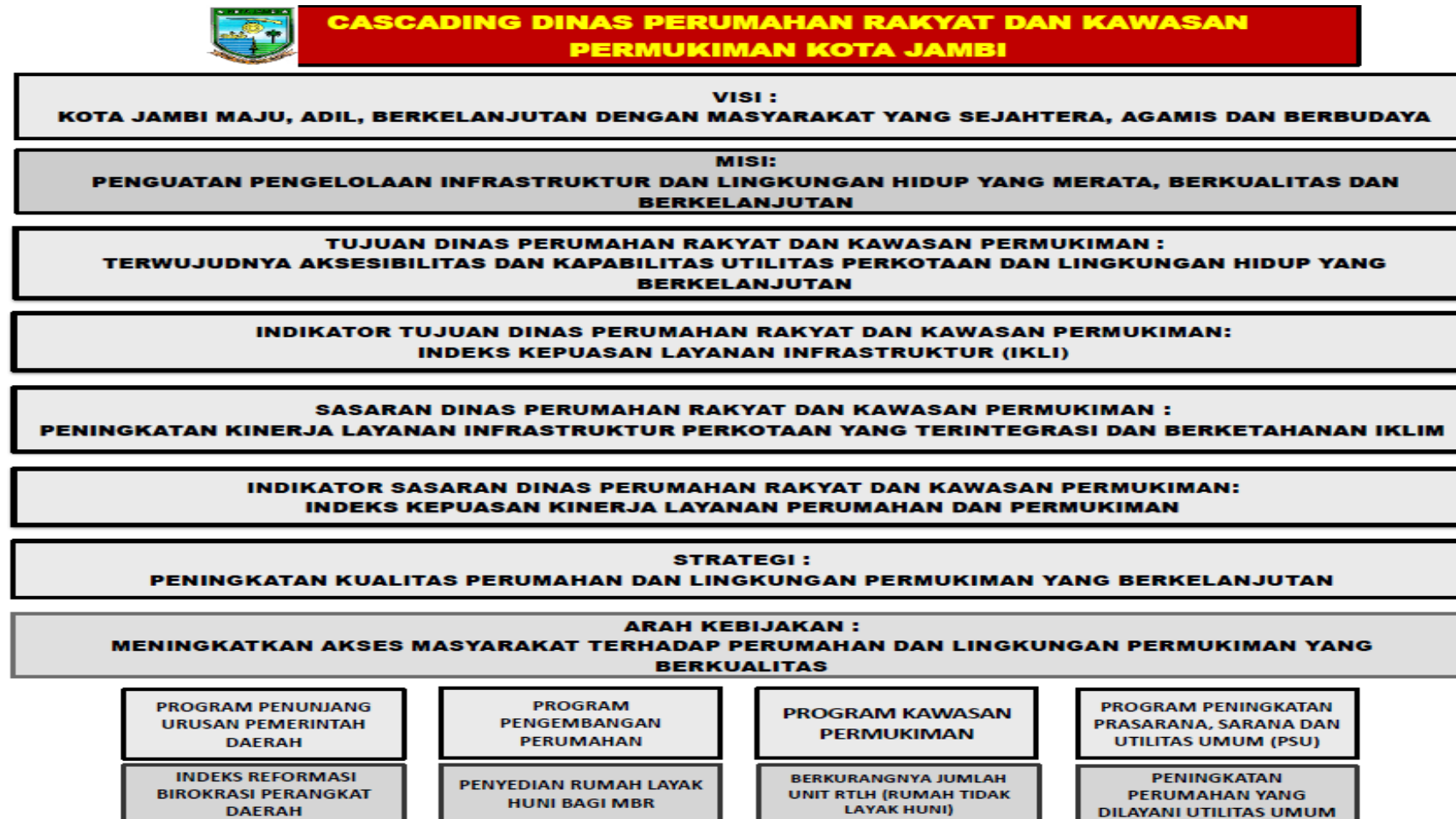
2.1 Pagu Belanja Perangkat Daerah Berdasarkan Komponen Belanja beserta Realisasi

Tabel 2.1
Penjabaran Belanja Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Realisasi	Silpa
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%		
A	B	C	D	E	F	G	
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	Rp38.136.901.981,00	Rp43.550.012.503,00	Rp5.413.110.522	14%	Rp41.728.841.386,00	Rp1.821.171.117,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 6.108.932.211,00	Rp 5.492.182.211,00	-Rp616.750.000	-10%	Rp4.963.905.331	Rp528.276.880,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp30.287.969.770,00	Rp36.317.830.292,00	Rp6.029.860.522,00	20%	Rp35.124.936.055	Rp1.192.894.237,00
5.1.03	Belanja Bunga	Rp0	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	Rp0	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0,00
5.1.05	Belanja Hibah	Rp0	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp1.740.000.000,00	Rp1.740.000.000,00	Rp0	0%	Rp1.640.000.000	Rp100.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	Rp2.116.558.019,00	Rp2.116.558.019,00	Rp0	0%	Rp2.107.763.659,00	Rp8.794.360,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp0	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp290.069.040,00	Rp290.069.040,00	Rp0	0%	Rp284.841.540	Rp5.227.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp1.416.489.000,00	Rp1.416.489.000,00	Rp0	0%	Rp1.413.332.119	Rp3.156.881,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp409.999.979,00	Rp409.999.979,00	Rp0	0%	Rp409.590.000	Rp409.979,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp0	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp0	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0,00
	Jumlah Belanja	Rp40.253.460.000	Rp45.666.570.522	Rp5.413.110.522	13%	Rp43.836.605.045,00	Rp1.829.965.477,00
	Total Surplus (Defisit)	-Rp39.818.460.000	-Rp45.414.570.522			-Rp43.718.875.045,00	

2.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

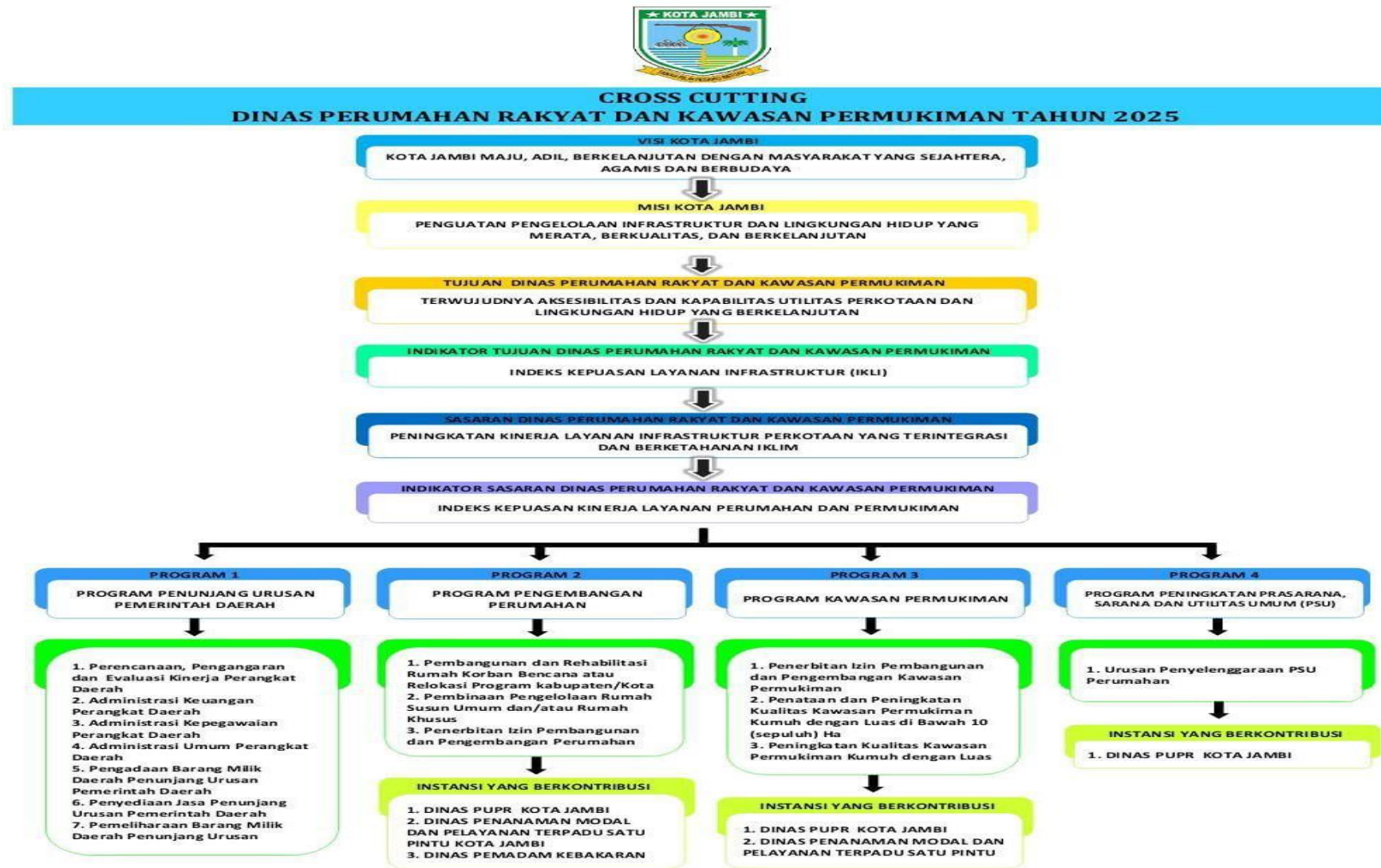
a. Cascading dari RPJMD ke Renstra sampai Sub Kegiatan untuk Tahun 2025



b. Pohon Kinerja



c. Crosscutting



2.3 CAPAIAN KINERJA SASARAN RPJMD, TUJUAN DAN SASARAN OPD

a. Keterkaitan Urusan Perangkat Daerah Terhadap RPJMD

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi. Pada RPD Kota Jambi tahun 2025-2026 urusan ini mengacu pada Misi 5, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan, dengan sasaran RPD yakni Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim. Adapun keterkaitan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan RPD Kota Jambi tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Keterkaitan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dengan RPD Kota Jambi Tahun 2025-2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025
Penguatan Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan permukiman	8.67	8.70

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi 2025

Indikator Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perumahan dan Permukiman memiliki target 8,67 pada tahun 2025 dan mencapai realisasi sebesar 8,70 (Kategori Baik). Perhitungan Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perumahan dan Permukiman dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai yang ada di setiap 9 unsur dibagi dengan jumlah unsur. Nilai yang tertera di 9 unsur dibawah ini merupakan hasil dari survey kepuasan masyarakat dengan responden sebanyak 350 orang dengan memberikan kuesioner pertanyaan yang mencakup 9 unsur tersebut. Unsur pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yang disurvei adalah :

- 1. Unsur Persyaratan Pelayanan dengan nilai 8,95.
- 2. Unsur Prosedur Pelayanan dengan nilai 8,80.
- 3. Unsur Kecepatan Pelayanan dengan nilai 8,86.
- 4. Unsur Kesesuaian biaya pelayanan dengan nilai 8,84.
- 5. Unsur Kesesuaian hasil pelayanan dengan nilai 8,81.
- 6. Unsur Kemampuan petugas pelayanan dengan nilai 8,88.
- 7. Unsur Sikap petugas pelayanan dengan nilai 8,82.
- 8. Unsur Pengaduan dengan nilai 8,58.
- 9. Unsur Sarana dan Prasarana dengan nilai 8,55.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Total Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Pada Tahun 2025

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Operasional	Rp. 43.550.012.503	Rp.41.728.841.386	95,82%
Belanja Modal	Rp. 2.116.558.019	Rp. 2.107.763.659	99,58%
Total Anggaran	Rp. 45.666.570.522	Rp. 43.836.605.045	95,99%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi 2025

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar **Rp. 252.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp.117.730.000,00 (46,72%)**. Realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan untuk jenis PAD Rusunawa dimana terdapat 70 kamar sedangkan yang dihuni hanya kurang lebih 27 kamar, hal ini disebabkan pada kondisi saat ini prioritas penyewa hanya untuk PNS, PPPK, dan TTK yang bekerja di Instansi Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi.

b. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Adapun capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Pada Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Komponen Sasaran 2025	
			Target 2025	Realisasi 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR	83,43%	92,20%
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani	52,35%	55,65%
		Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum	92,40%	97,65%
		Persentase Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	0%	0%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi 2025

Tabel diatas menyajikan capaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR dengan target 83,43% memperoleh realisasi sebesar 92,20%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Backlog yang tertangani s.d Tahun 2025 dibagi dengan Jumlah Backlog Perumahan yang harus ditangani di Kota Jambi dikali 100%. Jumlah Pembangunan Rumah Baru sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 36.737 unit, khusus di Tahun 2025 Pembangunan Rumah Baru sebanyak 3.803 unit dengan rincian sbb:

- Type 36 sebanyak 3.624 unit.
- Type 50-69 sebanyak 99 unit.
- Type 70++ sebanyak 15 unit.
- Type Toko/Ruko sebanyak 65 unit.

Jumlah Backlog Perumahan yang harus ditangani di Kota Jambi sebanyak 39.847 unit.

2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani dengan target 52,35% pada tahun 2025 memperoleh realisasi sebesar 55,65%, perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani sampai dengan tahun 2025 dibagi dengan Target Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang harus ditangani di Kota Jambi dikali dengan 100%. Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani sampai dengan tahun 2025 sebanyak 2.955 unit dengan jumlah bedah rumah yang dilaksanakan pada Tahun 2025 sebanyak 207 Unit dengan rincian sbb :

- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 73 unit.
- Program Pemerintah Provinsi Jambi Dua Milyar Satu Kecamatan (Dumisake) sebanyak 50 unit.
- Dana APBD Kota Jambi sesuai Keputusan Walikota Jambi No.437 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 sebanyak 82 unit.
- Program Bantuan Baznas Kota Jambi sebanyak 1 Unit
- Program Bantuan Baznas Provinsi Jambi sebanyak 1 Unit
- SK Walikota tentang lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Jambi nomor 322 tahun 2024 terdapat sebanyak 863,66 Ha, merujuk kepada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh salah satu aspek dalam pengurangan kumuh yaitu Kondisi Bangunan Gedung dengan kriteria Ketidak Sesuaian Dengan Persyaratan Teknis Bangunan di kota Jambi adalah penanganan rumah tidak Layak huni, dampak dengan adanya penanganan rumah tidak layak huni pada tahun 2024 diantaranya memiliki capaian pengurangan kumuh seluas 0,10 Ha.

Target Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang harus ditangani di Kota Jambi adalah sebanyak 5.310 unit.

3. Peningkatan perumahan yang di layani utilitas umum dengan target 92,40% pada tahun 2025 memperoleh realisasi sebesar 97,65%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus persentase lampu jalan yang tertangani dikali bobot 95,00% ditambah dengan persentase Lokasi Makam yang Tertangani dikali bobot 5,00%.
- a. Perhitungan Persentase Lampu Jalan yang Tertangani diperoleh dari realisasi jumlah lampu jalan yang tertangani sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 27.171 unit dibagi dengan target jumlah lampu jalan yang tertangani di Kota Jambi sebanyak 27.500 unit dikali 100%, sehingga memperoleh realisasi sebesar 98,80%. Khusus di Tahun 2025 jumlah lampu jalan yang tertangani sebanyak 2.260 unit dengan rincian sbb:
 - Pemasangan Lampu Jalan sebanyak 1.308 Unit.
 - Pemeliharaan Lampu Jalan Sebanyak 952 Unit.
 - b. Perhitungan Persentase Lokasi Makam yang Tertangani diperoleh dari Realisasi Jumlah

Lokasi Pemakaman yang Tertangani sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 75 Lokasi dibagi dengan Jumlah Lokasi Pemakaman yang ada di Kota Jambi sebanyak 99 lokasi dikali 100%, sehingga memperoleh realisasi sebesar 75,76%. Khusus di Tahun 2025 jumlah Lokasi Makam yang tertangani sebanyak 14 Lokasi dengan rincian sbb:

- Pemasangan Konblok 2 Lokasi
- Pembangunan Gazebo 1 Lokasi
- Pembangunan Pagar Makam 10 Lokasi
- Pembangunan Saluran Air 1 Lokasi

4. Persentase luas peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh

Persentase luas peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada periode pelaporan ini ditetapkan dengan target sebesar **0%** dan terealisasi **0%**. Penetapan target 0% dilakukan karena pada tahun berjalan tidak terdapat program, kegiatan, maupun alokasi anggaran yang secara khusus diarahkan untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.

Dengan demikian, realisasi 0% telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program, meskipun belum terdapat intervensi fisik maupun nonfisik terkait penanganan atau peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada periode tersebut.

b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun 2025 memiliki 4 program, 14 kegiatan, 33 sub kegiatan sebagaimana tersaji :

Tabel 2.4
Capaian Program Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PAGU ANGGARAN							45.666.570.522		43.836.605.045	95,99 %	100,00 %		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPRKP	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7.177.001.218	BB	6.248.953.502	87,07 %	100,00 %		
				<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Peningkatan Nilai AKIP	75	65.013.665	75,35	56.983.130	87,65 %	100,00 %		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	49.272.755	7	41.718.410	84,67 %	100,00 %	Pagu anggaran mengalami pengurangan akibat kebijakan efisiensi	Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi pada belanja alat tulis kantor dan belanja cetak
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.740.910	1	15.264.720	96,97 %	100,00 %	Pagu anggaran mengalami pengurangan akibat kebijakan efisiensi	Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi pada belanja alat tulis kantor dan belanja cetak

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	100%	5.811.701.761	100%	5.215.511.331	89,74%	100,00%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	5.492.182.211	50	4.963.905.331	90,38%	100,00%	Tidak ada permasalahan	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	293.240.000	1	226.880.000	77,37%	100,00%	Efisiensi Anggaran	Pembayaran honor pengelola keuangan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	26.279.550	12	24.726.000	94,09%	100,00%	Pagu anggaran mengalami pengurangan akibat kebijakan efisiensi	Diupayakan ketepatan penyusunan laporan keuangan dengan optimalisasi sumber daya untuk menyiasati keterbatasan anggaran.
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	116.600.000	100%	100.265.847	85,99%	100,00%		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	66.600.000	80	66.600.000	100,00%	100,00%	Tidak ada permasalahan	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	50.000.000	25	33.665.847	67,33%	100,00%	Keterbatasan mobilisasi pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis yang banyak diselenggarakan di luar kota	Optimalisasi yang dilakukan dengan mengikuti bimtek secara online

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	367.532.192	100%	312.582.328	85,05 %	100,00 %		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.606.830	1	7.055.281	92,75%	100,00%	Tidak ada masalah	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	163.876.274	1	131.538.890	80,27%	100,00%	Sulit menemukan penyedia yang sudah pengukuhan pengusaha kena pajak dalam melakukan belanja alat kebersihan kantor, sehingga sekali pencairan belanja tersebut hanya bisa dibawah nominal dua juta rupiah	Transaksi dilakukan melalui marketplace inaproc
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.456.638	1	33.097.456	93,35%	100,00%	Pagu anggaran mengalami pengurangan akibat kebijakan efisiensi	Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi pada bahan cetak
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	15.667.650	5	4.875.000	31,12%	100,00%	Efisiensi belanja makan minum rapat	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	144.924.800	30	136.015.701	93,85%	100,00%	Tidak ada permasalahan	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	288.555.000	100%	283.327.500	98,19 %	100,00 %		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 unit	198.545.000	33	196.303.500	98,87%	100,00%	Tidak ada permasalahan	

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	90.010.000	9	87.024.000	96,68%	100,00%	Tidak ada permasalahan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	167.500.000	100%	62.023.105	37,03%	100,00%		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	3 Laporan	2.500.000	3	2.500.000	100,00%	100,00%	Tidak ada permasalahan	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000	12	59.523.105	36,07%	100,00%	Efisiensi Anggaran dan Penurunan Tagihan Listrik dan Air dikarenakan sebagian pegawai berkantor di Dinas Dukcapil (Bangunan Gedung Kantor DPRKP sedang dibangun ulang)	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	360.098.600	100%	218.260.261	60,61%	100,00%	Efisiensi Anggaran dan untuk Pemeliharaan AC hanya dilakukan Cuci AC yang hanya menghabiskan dana sebesar Rp.150.000,00/ unit dari Anggaran sebesar Rp.677.100,00/ unit AC.	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	285.144.800	29	194.397.451	68,17%	100,00%	Efisiensi Anggaran	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 kali	74.953.800	32	23.862.810	31,84%	100,00%	Efisiensi Anggaran dan untuk Pemeliharaan AC hanya dilakukan Cuci AC yang hanya menghabiskan dana sebesar Rp.150.000,00/ unit dari Anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												sebesar Rp.677.100,00/ unit AC.	
				Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	83,43%	570.343.368	92,20%	438.991.013	76,97%	100,00%	Efisiensi Anggaran karena hasil negoisasi PPBJ dalam pengadaan barang/jasa secara epurchasing dan karena tidak ada realisasi sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dikarenakan tidak ada bencana	
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100,00%	100.000.000	100,00%	-	0,00%	0,00%	Tidak ada terjadi Bencana	
				Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terehabilitasi	10 unit	100.000.000	0	-	0,00%	0,00%	Tidak ada terjadi Bencana	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100,00 %	133.727.663s	100,00 %	108.155.098	80,88 %	100,00 %	Efisiensi Anggaran karena hasil negoisasi PPBJ dalam pengadaan barang/jasa secara epurchasing	
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	133.727.663	1	108.155.098	80,88%	100,00%	Efisiensi Anggaran karena hasil negoisasi PPBJ dalam pengadaan barang/jasa secara epurchasing	
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00 %	336.615.705	100,00 %	330.835.915	98,28 %	100,00 %	Efisiensi Anggaran karena hasil negoisasi PPBJ dalam pengadaan barang/jasa secara epurchasing	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara	1 Dokumen	121.990.329	1	119.227.020	97,73%	100,00%	Efisiensi Anggaran karena hasil negoisasi PPBJ dalam pengadaan barang/jasa Secara Secara Epurchasing	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Elektronik								
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	214.625.376	5	211.608.895	98,59%	100,00%	Efisiensi Anggaran karena hasil negoisasi PPBJ dalam pengadaan barang/jasa secara epurchasing	
				Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Humi yang Tertangani	47,36%	2.283.211.700	55,65%	2.258.502.617	98,92%	100,00%		
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanPembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100,00%	28.844.200	100,00%	25.102.612	87,03%	100,00%	Efisiensi belanja makan minum rapat	Penyesuaian dilakukan dengan optimalisasi rapat koordinasi lintas OPD dan lintas sektoral berjalan efektif terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan penyusun kebijakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait belanja makan minum rapat

				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	28.844.200	1	25.102.612	87,03%	100,00%	Efisiensi belanja makan minum rapat	Penyesuaian dilakukan dengan optimalisasi rapat koordinasi lintas OPD dan lintas sektoral berjalan efektif terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan penyusun kebijakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait belanja makan minum rapat
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100,00 %	341.900.760	100,00 %	337.268.750	98,65 %	100,00 %		
				Penyusunan/Revi ew/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/T erlegalisasi	2 Dokumen	341.900.760	2	337.268.750	98,65%	100,00%	Efisiensi belanja makan minum rapat	Penyesuaian dilakukan dengan optimalisasi rapat koordinasi lintas OPD dan lintas sektoral berjalan efektif terutama yang bersentuhan langsung dengan

									masyarakat dan penyusun kebijakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait belanja makan minum rapat
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	52,35%	1.912.466.740	55,65%	1.896.131.255	99,15%	100,00%	Efisiensi belanja makan minum rapat, efisiensi perjalanan dinas luar daerah dan sisa nego ATK (Efisiensi Anggaran karena hasil negoisasi PPBJ dalam pengadaan barang/jasa secara epurchasing) Penyesuaian dilakukan dengan optimalisasi rapat koordinasi lintas OPD dan lintas sektoral berjalan efektif terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan penyusun kebijakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait belanja makan minum rapat. Perjalanan Dinas luar daerah dioptimalisasi untuk agenda yang memerlukan kehadiran langsung. untuk efisiensi ATK pembelian melalui e-katalog untuk mendapatkan harga standar dan transparan

			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	82 unit	1.893.308.410	257	1.879.642.327	99,28%	100,00%	Efisiensi belanja makan minum rapat, efisensi perjalanan dinas luar daerah dan sisa nego ATK (Efisiensi Anggaran karena hasil negoisasi PPBJ dalam pengadaan barang/jasa secara epurchasing)	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	19.158.330	1	16.488.928	86,07%	100,00%	Efisiensi belanja makan minum rapat	Penyesuaian dilakukan dengan optimalisasi rapat koordinasi lintas OPD dan lintas sektoral berjalan efektif terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan penyusun kebijakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait belanja makan minum rapat
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	92,40%	35.636.014.236	97,66%	34.890.157.913	97,91%	100,00%		
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	92,40%	35.636.014.236	97,66%	34.890.157.913	97,91%	100,00%	Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target yang telap ditetapkan	

Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	1 Dokumen	65.815.863	1	63.289.777	96,16%	100,00%	Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	400 Lokasi	35.467.203.178	400	34.741.268.956	97,95%	100,00%	Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10 Laporan	89.121.470	10	72.635.280	81,50%	100,00%	Efisiensi belanja makan minum rapat	
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	13.873.725	1	12.963.900	93,44%	100,00%	Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan	

c. Kebijakan Strategi Yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang dimaksud dalam Subbab ini adalah kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan strategis yang diambil kepala daerah selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Kebijakan Strategis yang Diambil Kepala Daerah Selama Tahun 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Meningkatkan Layanan Insfrastruktur dan Utilitas Perkotaan	SK Walikota Jambi Nomor 437 Tahun 2025 Tentang Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025.	Penyeleggaran, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

d. Tidak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Jambi Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahun 2024)

Tabel 2.5
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Pansus DPRD Terhadap LKPJ Walikota Jambi Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	DPRKP	Pansus III merekomendasikan Dinas DPRKP agar mengoptimalkan pemanfaatan rumah susun yang ada di Rumah Sakit H. Abdul Manap.	- Membentuk tim khusus untuk optimalisasi pelayanan, promosi dan sosialisasi rumah susun abdul manab - Menyusun aturan untuk Membuka fasilitas sewa harian bagi masyarakat/pasien rumah sakit.	belum optimalnya keterisian/pemanfaatan hunian pada rumah susun dikarenakan: - Rusun susun abdul manab masih diperuntukan untuk hunian terbatas ASN kota jambi sehingga belum diperuntukan untuk masyarakat umum. - Belum maksimalnya promosi dan sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat dan ASN kota jambi.

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2.	DPRKP	Pansus III merekomendasikan Dinas DPRKP agar Menambah lampu penerangan jalan.	Memfasilitasi Pemasangan (Pokir) dan Pemeliharaan Lampu Jalan.	Masih kurangnya Penganggaran Lampu Jalan Umum Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi .
3.	DPRKP	Pansus III merekomendasikan Dinas DPRKP agar Memperhatikan sarana dan prasarana tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di Kota Jambi (penerangan dan pagar).	Ada beberapa TPU yang telah terpasang penerangan dan pagar.	1. Agar mempermudah masyarakat dalam proses pemakaman 2. Masih kurangnya Pengajuan Masyarakat Untuk PJU di Pemakaman . 3. Jauhnya Jaringan Listrik / Sumber arus Listrik 4. Masih Kurangnya Ketersedian tiang dan Lampu Penerangan yang akan dipasang pada Pemakaman Umum .
4.	DPRKP	Pansus III merekomendasikan Dinas DPRKP agar Kegiatan bedah rumah agar diperbanyak dan tepat sasaran	Mengupayakan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni melalui berbagai sumber pendanaan.	Masih kurangnya Penganggaran dana APBD Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di DPRKP.
5.	DPRKP	Pansus III merekomendasikan Dinas DPRKP agar Lebih cermat dalam penyusunan anggaran agar tidak terlalu jauh deviasi antara target dan realisasi	Penyusunan anggaran Tahun 2025 sudah diupayakan seoptimal mungkin dengan memperhatikan silpa anggaran Tahun 2024.	Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2025 mencapai 95,99%.

2.4 AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan permukiman	8.72%

b. Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023 – 2025

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data
		2023	2024	2025	
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganan	-	-	-	LPPD DPRKP TH 2023-2025
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	-	-	-	LPPD DPRKP TH 2023-2025
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	-	-	-	LPPD DPRKP TH 2023-2025
4	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	67,12	60,43	60,43	LPPD DPRKP TH 2023-2025
5	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	537 Unit Rumah	364 Unit Rumah	207 Unit Rumah	LPPD DPRKP TH 2023-2025
6	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	28,26 Ha	28,26 Ha	28,26 Ha	LPPD DPRKP TH 2023-2025
7	Jumlah rumah di kab/kota	157.326 Unit	157.326 Unit	160.591 Unit	LPPD DPRKP TH 2023-2025
8	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	537 Unit Rumah	166 Unit Rumah	207 Unit Rumah	LPPD DPRKP TH 2023-2025
9	Jumlah rumah tidak layak huni	5.550	6.510	6510	LPPD DPRKP TH 2023-2025

c. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 - 2025

Tebel 2.8
Capaian Kinerja Standar Pelayan Minimal (SPM) Perangkat Daerah
Kota Jambi Tahun 2023 – 2025

No	Uraian SPM	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota. - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Perumahan.	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Bencana dan Lokasi yang Berpotensi terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota. 2. Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
2	Rehabilitasi Rumah bagi Korban BencanaProgram Kabupaten/Kota.	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	-

d. Capaian SDGs

Menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025		PD PENGAMPU
			TARGET	REALISASI	
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	100.00%	95,95%	DPRKP

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU

Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tidak ada Tugas Pembantuan.

BAB IV
INOVASI, PRESTASI DAN PENGHARGAAN

NO	INOVASI	TAHUN	NAMA OPD	KATEGORI INOVASI	RINGKASAN INOVASI
1	SIPANJUL (SISTEM INFORMASI PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN)	2025	DPRKP	Pelayanan Publik	Program SIPANJUL (Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan) adalah bentuk lanjutan dari SIPANDEL merupakan aplikasi berbasis web yang mana dirancang untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi guna meningkatkan Administrasi pada kantor DPRKP agar lebih efisien, lebih mudah, cepat, dan terarsipkan dengan rapi. Aplikasi ini terbuka untuk umum yang mana masyarakat bisa mengajukan lampu dan pelaporan jalan melalui website dan bisa di pantau apakah sudah dilakukannya perbaikan, diterima atau tidak proposal pengajuan lampu jalannya. Untuk staf administrasi perkatoran DPRKP Bidang PSU dapat melakukan pemetaan lokasi lampu jalan dan kwh meter. Bisa juga di lakukan nya penjadwalan melalui web, pengeluaran barang, dan penghitungan stand meter / pemakaian kwh meter perbulannya.

BAB V

PENUTUP

Laporan Tahunan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025. Pembuatan Laporan Tahunan ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 154 ayat 1 butir h menyatakan bahwa meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Adapun sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tersebut menggunakan dasar Laporan Tahunan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Laporan Tahunan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Indikator Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perumahan dan Permukiman memiliki target 8,67 pada tahun 2025 dan mencapai realisasi sebesar 8,70 (Kategori Baik). Perhitungan Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perumahan dan Permukiman dihitung dari hasil survei 350 orang responden masyarakat kota jambi. Jenis unit pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yang disurvei adalah :

- Jenis Pelayanan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan nilai 9,03.
- Jenis Pelayanan Perumahan dengan nilai 8,94.
- Jenis Pelayanan Lampu Penerangan Jalan Umum dengan nilai 8,12.

Dalam Tahun Anggaran 2025 pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 45.666.570.522,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 43.836.605.045,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi kondisi anggaran dengan Silpa Rp.1.829.965.477,-.

Dengan tersusunnya Laporan Tahunan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAMBI**



M. WILDAN MURTADHO AL-IDRUS, S.P., MH
Pemula

NIP. 1980509 200901 1 013